

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejumlah besar individu di ranah *internasional* mengidamkan kehidupan sejahtera, tetapi hanya segelintir yang berhasil menikmatinya. Terdapat berbagai faktor yang memengaruhi kemampuan seseorang dalam meraih kehidupan yang sejahtera, termasuk aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan menerapkan pembangunan berkelanjutan secara efektif dan efisien, suatu negara dapat meningkatkan kesejahteraan penduduknya.

Paradigma pembangunan saat ini mengalami transformasi, awalnya berfokus pada pertumbuhan atau orientasi produk, kemudian beralih menjadi pembangunan yang berpusat pada masyarakat atau *people center development* (BPS Jawa Barat, 2021). Wilayah Indonesia dianugerahi kelimpahan sumber daya alam, potensi perekonomian Indonesia dapat ditingkatkan melalui pengelolaan yang bijaksana terhadap SDA, terutama jika dijalankan oleh SDM yang kompeten.

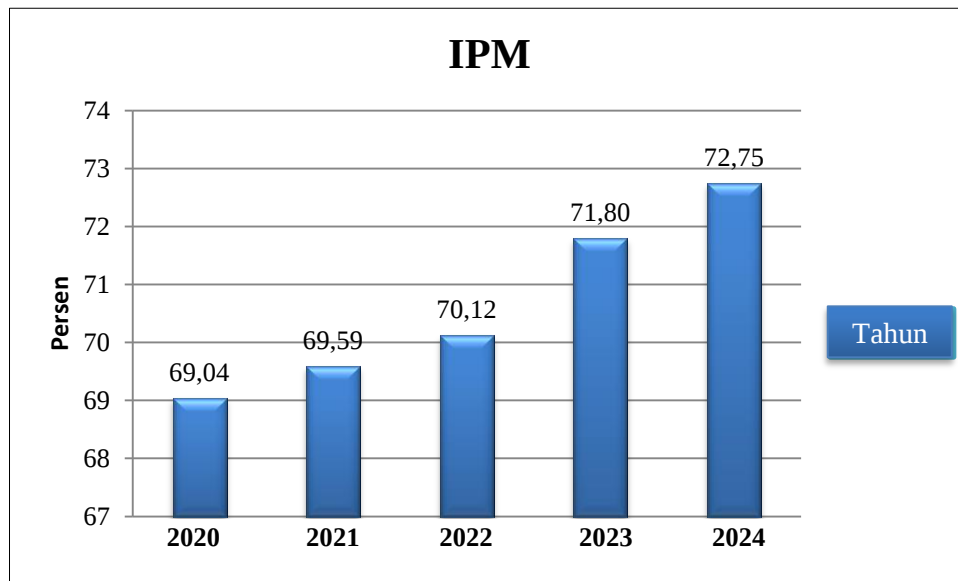
Adam Smith menyatakan SDM menjadi unsur krusial dalam rantai produksi yang memengaruhi kemakmuran negara. Pemahaman ini menekankan bahwa alam atau tanah tidak memiliki nilai ekonomi yang signifikan tanpa adanya SDM yang mampu mengelolanya secara menguntungkan bagi kehidupan. Artinya, nilai ekonomi suatu sumber daya alam hanya muncul ketika ada SDM yang dapat memanfaatkannya secara berdaya guna. (Ningrum j. w., 2020)

Sebagai langkah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya, suatu negara dapat melibatkan diri dalam upaya pembangunan, terutama di sektor ekonomi sebagai jalan menuju peningkatan kesejahteraan. Penilaian terhadap taraf kualitas sumber daya manusia dan pencapaian ekonomi sering kali dilakukan melalui IPM. (Sri Muljaningsih, 2021)

IPM merupakan instrumen penting dalam menilai pencapaian pembangunan yang berfokus pada kualitas sumber daya manusia. UNDP merilis IPM pada tahun 1990 sebagai pendekatan baru dalam menilai pembangunan berbasis manusia dan menjadi dasar evaluasi di berbagai negara. BPS turut andil mengubah beberapa referensi evaluatif IPM yang telah usang, seperti angka harapan hidup mencerminkan derajat kesehatan penduduk, angka melek huruf diubah menjadi angka harapan lama sekolah serta rata-rata lama sekolah sebagai tolak ukur tingkat pendidikan, kemudian indikator paritas daya beli yang dapat dijadikan gambaran mengenai standart hidup yang layak bagi masyarakat.

Agar sesuai dengan dinamika zaman, dengan mempertimbangkan dimensi-dimensi ini, IPM tidak hanya memberikan pandangan menyeluruh tentang kesejahteraan manusia, melainkan juga memperhitungkan aspek-aspek yang mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Sebagai alat evaluasi pembangunan, IPM mencerminkan potret yang komprehensif mengenai kemajuan masyarakat pada konteks kualitas kehidupan yang layak. (Ningrum j. w., 2020)

Gambar Grafik 1.1 IPM Kabupaten Bojonegoro 2020-2024



Sumber : BPS Bojonegoro

Merujuk Grafik 1.1 mencerminkan progres yang mengesankan dalam IPM wilayah Bojonegoro, menunjukkan peningkatan sepanjang periode berlangsung, IPM Kabupaten Bojonegoro mengalami perkembangan sekitar 0,90 persen per tahun dan berhasil mencapai tingkat "tinggi" sejak tahun 2022. Meskipun demikian, terlihat bahwa pandemi COVID-19 tidak secara signifikan memengaruhi pencapaian transformasi kapasitas manusia di wilayah Bojonegoro.

IPM mewakili suatu bentuk proses dan hasil, bukan hanya menyoroti perluasan pilihan individu, tetapi juga menjadi tujuan itu sendiri. Dalam konteks ini, pembangunan manusia menandakan perlunya kesadaran aktif untuk memengaruhi fase perkembangan yang berkontribusi pada arah hidup mereka. Meskipun pertumbuhan ekonomi menjadi aspek vital bagi kenaikan mutu hidup dan kecakapan individu, hal tersebut bukanlah fokus akhirnya. Kenaikan mutu hidup dan kecakapan individu mencakup pemberdayaan masyarakat

menggunakan pendekatan peningkatan kapabilitas manusia, yang dicapai dengan keterlibatan langsung dalam dinamika yang memengaruhi arah kehidupan serta struktur sosial di lingkungan mereka.

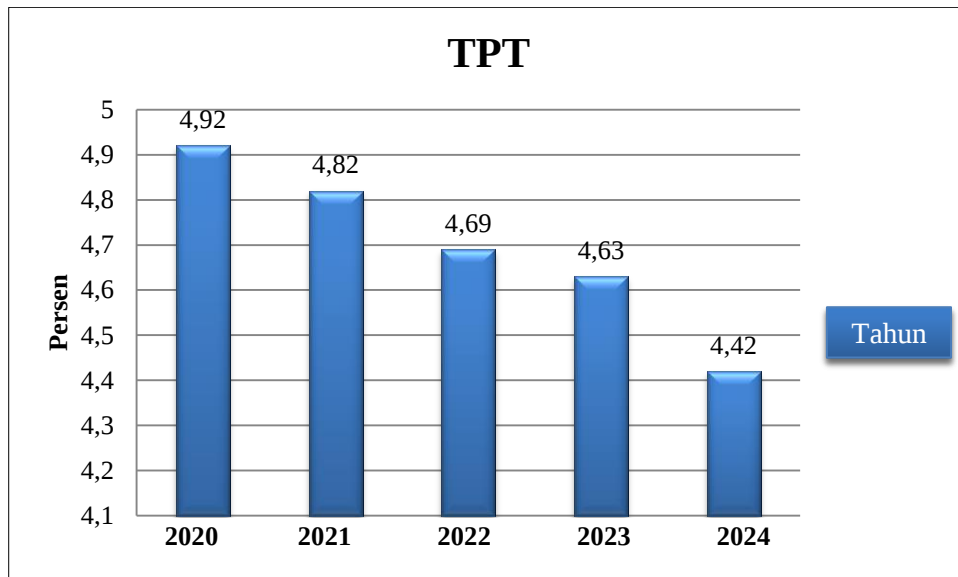
Pembangunan Manusia menjadi penilaian krusial untuk menentukan status sebuah negara, apa itu diklasifikasikan sebagai negara maju, berkembang, ataupun tertinggal. Dalam konteks ini, IPM menjadi bobot keberhasilan proses yang menyeluruh, sebagai tolok ukur kemajuan dalam aspek pembangunan manusia.

IPM perkembangan manusia digambarkan sebagai "*A way to expand individual's opportunities and freedoms*" atau langkah-langkah untuk memperluas pilihan bagi masyarakat. Laporan "*Human Development Report 1990*" dari UNDP mengidentifikasi tiga dimensi utama, yakni *Sustained well-being and longevity* (usia yang sehat serta panjang), *Study intellectual* (Pendidikan), serta *Adequate living conditions and economic security* (Kondisi hidup yang layak dan jaminan ekonomi). Konsep tersebut mengacu pada upaya sistematis untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia melalui pemahaman dan implementasi tindakan yang terfokus pada aspek-aspek kunci peningkatan kualitas hidup individu.

IPM menerangkan bahwa pengukuran dimensi kesehatan diukur berdasarkan estimasi tingkat harapan hidup dihitung sejak lahir, sedangkan sektor pendidikan dinilai melalui dua tolok ukur, yaitu rata-rata lama sekolah penduduk berusia 25 tahun ke atas serta estimasi lama pendidikan yang akan ditempuh oleh anak yang baru memasuki usia sekolah. pendidikan formal, sedangkan dimensi

standar hidup direfleksikan melalui besaran ukuran pendapatan agregat nasional yang dibagi menurut jumlah penduduk.

Gambar Grafik 1.2 TPT Bojonegoro 2018-2024



Sumber : BPS Kabupaten Bojonegoro

Gambar 1.3 memperlihatkan TPT di Bojonegoro berdasarkan tingkat pendidikan yang telah diselesaikan. Data visual ini dapat berfungsi sebagai salah satu parameter untuk mengevaluasi kapabilitas pasar dalam memanfaatkan pasokan tenaga kerja yang siap untuk bekerja. TPT cenderung tinggi pada kalangan penduduk berpendidikan tinggi. Dalam kurun waktu 2022, TPT pada pendidikan SMA umum mencapai 9,38%, sementara TPT untuk SMA Kejuruan sebesar 8,79%.

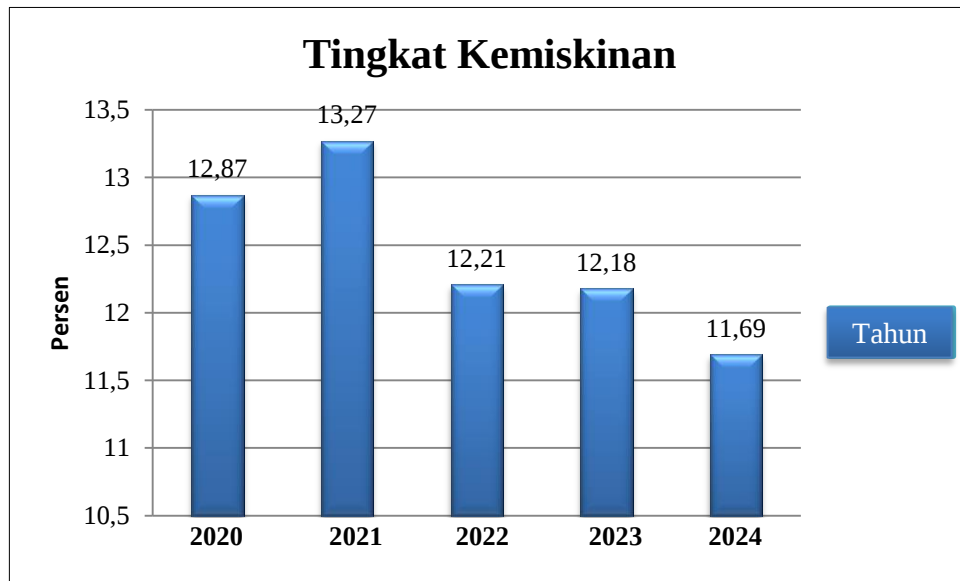
TPT merupakan perbandingan jumlah pengangguran terhadap keseluruhan tenaga kerja. Individu yang menganggur dengan latar belakang pendidikan setara SMA, termasuk perguruan tinggi khususnya di usia 15-24 tahun disebut sebagai penganggur terdidik. Para *new corner* ini sering muncul karena ketidaksesuaian keterkaitan antara pilihan jenis pekerjaan yang tersedia dengan ekspektasi upah di

pasar. Sebagian dari mereka yang menganggur dalam kelompok ini memilih untuk tidak bekerja bukan karena keterpaksaan, melainkan mereka menantikan pekerjaan yang sesuai tanpa tekanan untuk bertahan hidup. Dari segi pemenuhan kebutuhan sehari-harinya, umumnya mereka masih memiliki dukungan ekonomi dari keluarga, sehingga belum merasa terdesak untuk segera bekerja.

Pengangguran terbuka dalam konteks ketenagakerjaan mengacu pada kondisi saat individu tidak berhasil menemukan pekerjaan yang relevan dengan kualifikasinya, meskipun telah berusaha secara aktif. Situasi ini umumnya muncul ketika jumlah pencari kerja melampaui ketersediaan lapangan kerja, atau ketika mereka kesulitan menemukan pekerjaan yang cocok dengan keahlian yang dimiliki. Akibat dari kondisi ini dapat mencakup ketidakpastian penghasilan, melemahnya daya beli masyarakat, serta terhambatnya laju pertumbuhan ekonomi.(Asmara&Septiana,2024)

Keterlibatan aktif pemerintah dianggap sebagai suatu keharusan dalam upaya menciptakan lapangan pekerjaan. Pentingnya hal ini terlihat dalam perlunya pengembangan strategi dan kebijakan yang komprehensif serta pelaksanaannya yang berkelanjutan. Melibatkan seluruh *stakeholder* yang terkait, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, dianggap sebagai kunci utama dalam penciptaan lapangan pekerjaan yang berkesinambungan. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan dampak positif terhadap pembangunan manusia secara maksimal.

Gambar 1.3 Tingkat Kemiskinan Bojonegoro 2020-2024



Sumber : BPS Kabupaten Bojonegoro

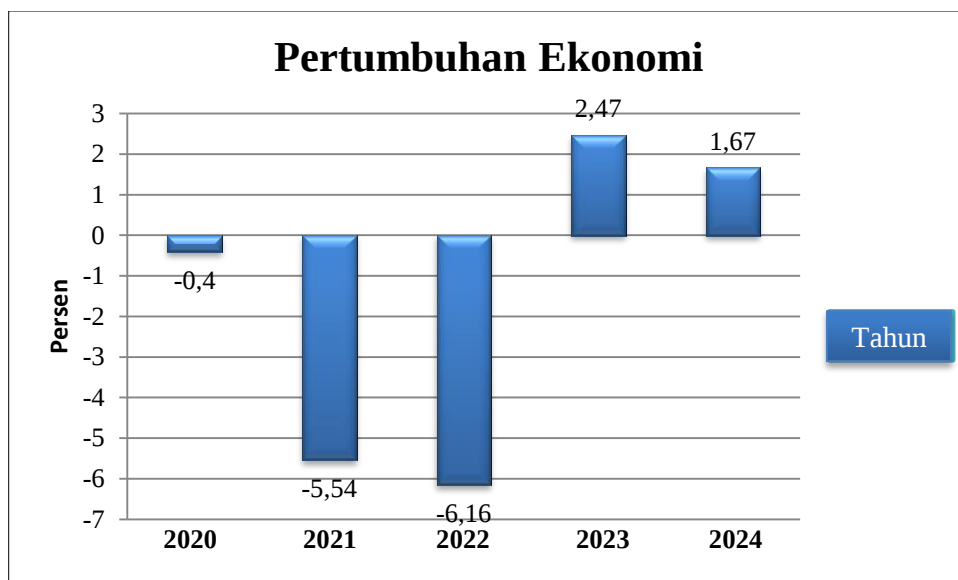
Gambar 1.3 dalam rentang waktu tersebut, persentase penduduk miskin di Kabupaten Bojonegoro mengindikasikan penurunan mencapai 0,03 persen, turun dari 13,27 persen pada Maret 2021 dan mengalami perubahan menjadi 12,21 persen Maret 2022. Secara keseluruhan, dalam rentang waktu 2013-2024, terdapat kecenderungan penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro, Di sisi lain, rasio penduduk dengan kondisi miskin di Kabupaten Bojonegoro pada 2013 senilai 15,95 persen, mengalami penurunan senilai -3,74 poin atau mencapai 11,69 persen pada tahun 2024.

Tingkat kemiskinan ialah individu yang tergolong berdasarkan besaran pengeluarannya rata-rata per kapita setiap bulan tidak mencapai standar garis kemiskinan. Tingkat Kemiskinan terjadi ketika kapasitas yang tersedia belum memadai dalam mencukupi kebutuhan esensial harian, menunjukkan kurangnya kemampuan atau daya beli. Apabila kondisi ketidakmampuan berlangsung secara terus-menerus dalam durasi yang panjang, maka hal tersebut akan berdampak

negatif pada mutu sumber daya manusia, dimana dapat mengakibatkan terjadinya degradasi produktivitas serta penurunan tingkat pendapatan.

Dalam penanganan permasalahan tingkat kemiskinan, peran pemerintah mengimplementasikan beragam instrumen kebijakan diterapkan guna memperkuat aktivitas perekonomian serta disparitas regional, serta untuk mengakselerasi pembangunan serta pertumbuhan ekonomi pada tingkat nasional, baik dalam konteks periode kini maupun mendatang.

Gambar Grafik 1.4 Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kabupaten Bojonegoro.

Gambar 1.5 menunjukkan pertumbuhan ekonomi kabupaten Bojonegoro pada empat tahun akhir tercatat adanya dinamika yang berfluktuasi, sementara pertumbuhan ekonomi kabupaten Bojonegoro di 2019 mulai mengalami kontraksi sebagai konsekuensi dari pandemi Covid-19, tahun 2020 mengalami pemerosotan pertumbuhan ekonomi sebesar -0,4%, menjadi semakin menurun drastis tahun

2021 hingga mencapai -5,54% serta masih mengalami turun pada 2022 sebesar -6,16%.

Dalam kajian ekonomi, pertumbuhan ekonomi mencerminkan bertambahnya potensi produksi barang dan jasa dalam suatu sistem perekonomian. Menurut Suharjo, (Firdania, 2022) pembangunan ekonomi seringkali memiliki dua fokus utama, yakni peningkatan pendapatan nasional dan pengurangan tingkat kemiskinan.

Setiap pemerintah di suatu wilayah memiliki strategi khusus dalam upaya membangun daerah, dengan tujuan agar penduduk dapat menikmati kesejahteraan hidup yang layak. Determinasi yang berkontribusi terhadap dinamika pertumbuhan ekonomi di Bojonegoro melibatkan dinamika internal dan eksternal. Di Kabupaten Bojonegoro, dinamika pertumbuhan ekonomi tidak lepas dari pengaruh faktor internal seperti potensi SDA serta kapasitas SDM, serta faktor eksternal meliputi keadaan pasar global serta kebijakan pemerintah pusat. Sebagai daerah yang kaya akan hasil bumi, terutama sektor migas dan pertanian, Bojonegoro memiliki peluang besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya melalui optimalisasi sektor-sektor unggulan tersebut. Namun, keberhasilan ini sangat bergantung pada kemampuan daerah dalam mengelola potensi lokal secara efisien serta keterbukaan terhadap perkembangan teknologi dan investasi. Selain itu, kestabilan ekonomi daerah juga dipengaruhi oleh kondisi eksternal, seperti fluktuasi harga minyak dan gas dunia serta regulasi nasional terkait distribusi pendapatan daerah. Oleh karena itu, kombinasi antara penguatan kapasitas lokal dan adaptasi terhadap dinamika eksternal menjadi patokan

menciptakan perekonomian yang tumbuh dengan inklusivitas serta terjaga keberlanjutannya di Bojonegoro.

Investasi yang diprioritaskan pada bidang-bidang strategis seperti pertanian, pertambangan, serta industri dapat menjadi katalisator pertumbuhan. Pengembangan infrastruktur lokal dan inovasi teknologi juga berpotensi mendorong aktivitas ekonomi. Konsumsi masyarakat terjaga serta tingkat daya beli yang tinggi juga memberikan kontribusi penting kepada pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal. Selain itu, kebijakan pemerintah daerah yang mendukung bisnis, menciptakan lingkungan usaha kondusif, dan memberikan insentif bagi investor lokal dapat membentuk fondasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Keterlibatan aktif dalam perdagangan internasional, khususnya dalam sektor ekspor lokal yang kompetitif, juga dapat memberikan dorongan ekonomi positif. Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia setempat, bersama dengan pemanfaatan teknologi dan inovasi, berperan sebagai determinan dalam memperkuat produktivitas sekaligus daya saing di pasar global.

Sejumlah studi sebelumnya telah mengkaji hubungan antara pertumbuhan ekonomi, TPT, dan kemiskinan terhadap IPM. Temuan dari berbagai penelitian tersebut menunjukkan hasil yang beragam yakni ada yang mengemukakan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat IPM suatu wilayah, sementara yang lain menemukan bahwa pengaruhnya tidak signifikan. Studi lain pun menunjukkan hasil yang serupa dalam studi terkait pengangguran dan kemiskinan beberapa menyatakan adanya implikasi kuat

terhadap IPM, sedangkan yang lain tidak menemukan pengaruh yang berarti. Ketidakkonsistenan hasil-hasil tersebut menunjukkan perlunya dilakukan penelitian lanjutan untuk memperjelas dampak dari keterkaitan antara ketiga variabel-variabel yang sedang diteliti oleh peneliti terhadap IPM.

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan dalam uraian latar belakang sebelumnya, penelitian ini diarahkan untuk mengeksplorasi lebih lanjut mengenai **“Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Kemiskinan, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Kabupaten Bojonegoro”**

1.2 Rumusan Masalah

Sejalan penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada perumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, secara fundamental bertujuan untuk mencapai sasaran sebagai berikut:

1. Apakah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Bojonegoro?
2. Apakah tingkat kemiskinan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Bojonegoro?
3. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan berlandaskan pada rumusan masalah yang telah disusun, maka penelitian ini ditujukan untuk mencapai sasaran sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Bojonegoro.
3. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Bojonegoro.

1.4 Lingkup Penelitian

Penelitian ini akan membahas TPT, tingkat kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi terhadap IPM di Bojonegoro. Data time series periode 2013 sampai 2024 digunakan dalam penelitian ini, dengan pendekatan analisis regresi linier berganda.

1.5 Manfaat Penelitian

Diharapkan bahwa temuan dari penelitian ini membawa sejumlah manfaat, antara lain:

1. Bagi Penulis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan serta memperdalam pemahaman mengenai hubungan TPT, tingkat kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Bojonegoro. Penelitian ini juga disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat kelulusan pada program studi guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Penelitian ini berpotensi menjadi sumber referensi bagi kajian lanjutan dengan fokus topik yang sejalan, sehingga mampu menyempurnakan keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini.
3. Temuan studi ini dapat memberikan kontribusi sebagai dasar rujukan dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan atau penelitian lanjutan bagi instansi terkait dalam proses pengambilan keputusan maupun penyusunan kebijakan yang relevan dengan IPM di Bojonegoro.